



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 (0752) 84506 Padang Panjang 27118
Email : itkopadangpanjang@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Barat untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Padang Panjang Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Padang Panjang, Maret 2026
Inspektur,



Ferino Romiko, S.STP.,M.Si.
Pembina IV.a/ Nip.198602102006021001

2025



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**KECAMATAN
PADANG PANJANG BARAT**

JL. RASUNA SAID NO, 44 KAMPUNG MANGGIS PADANG PANJANG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Padang Panjang, 18 Februari 2026

**CAMAT PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG**



**ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2025 – 2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat yang dihasilkan di tahun 2025 sebagai berikut :

❖ **Tujuan**

Tujuan dari Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat : “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif” dengan Indikator Tujuannya adalah “Indeks Pelayanan Publik” dengan target tahun 2025 sebesar 4.20 dan realisasi nihil

❖ **Sasaran**

Sasaran Kecamatan Padang Panjang Barat terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan;
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.

❖ Indikator Sasaran Kecamatan Padang Panjang Barat, terdiri atas 2 indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Barat dengan target tahun 2025 69,25 dan realisasi 2025 sebesar 70,05 % atau presentase capaian 101,15%
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat dengan target tahun 2025 sebesar 97,76 dan realisasi 2025 sebesar 93,15 atau persentase capaian 95,28 %.
3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat dengan target tahun 2025 sebesar 39,99 % dan realisasi sebesar 40,01 % atau persentase capaian 100,05%.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah.
- c. Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Barat;
2. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran;

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat;
2. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Padang Panjang Barat ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Padang Panjang Barat dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Struktur Organisasi.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	5
1.3 Permasalahan Utama (strategic issued).....	6
1.4 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	7
BAB II PERJANJIAN KINERJA	8
Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	8
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Realisasi Anggaran.....	20
BAB IV PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra 2025 – 2029 Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2025

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Padang Panjang Barat

Tabel Perhitungan Nilai SKM Tahun 2025 Kecamatan Padang Panjang Barat

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 (Per Sasaran Strategis) Kecamatan Padang Panjang Barat

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dan Target Akhir Renstra (Per Sasaran Strategis) Kecamatan Padang Panjang Barat

Tabel 3.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Padang Panjang Barat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Barat

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kelurahan Kecamatan Padang Panjang Barat

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2025, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Barat;
2. Mendorong Kecamatan Padang Panjang Barat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Padang Panjang Barat untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Padang Panjang Barat di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, terdiri dari :

1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Barat

➤ **Camat :**

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

➤ **Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dan kepegawaian alam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebuuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.

2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, dokumentasi kegiatan pembangunan perhubungan, koordinasi penusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan perhubungan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing- masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

➤ **Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di kelurahan-kelurahan, urusan kesatuan bangsa,

kependudukan, ketenagakerjaan dan pengelolaan pendapatan daerah di ruang lingkup Kecamatan Padang Panjang Barat, mengkoordinir kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan membuat rekomendasi akte catatan sipil serta melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi perizinan sporadik tanah.

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, pembinaan lomba Kelurahan dan urusan pembangunan di Kecamatan.

➤ **Seksi Sosial**

Seksi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan sosial dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, kesehatan, pengendalian penduduk, KB, perlindungan anak dan perempuan.

➤ **Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup kecamatan dan kelurahan.

1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat

➤ **Lurah :**

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketertiban umum, memelihara prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

➤ **Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, pemeliharaan aset dan keuangan di lingkup Kelurahan.

➤ **Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketertiban umum dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pembinaan lomba kelurahan dan lurah berkompentensi, urusan kesatuan bangsa dan politik, kependudukan, mengkoordinasikan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarkat, urusan pekerjaan

umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban bangunan, pembuangan air limbah, pengaliran drainase, persampahan, penanggulangan bencana, perpustakaan dan kearsipan di kelurahan.

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, urusan pembangunan dan penataan ruang, perumahan kawasan permukiman dan lingkungan hidup di Kelurahan.

➤ **Seksi Pelayanan dan Sosial**

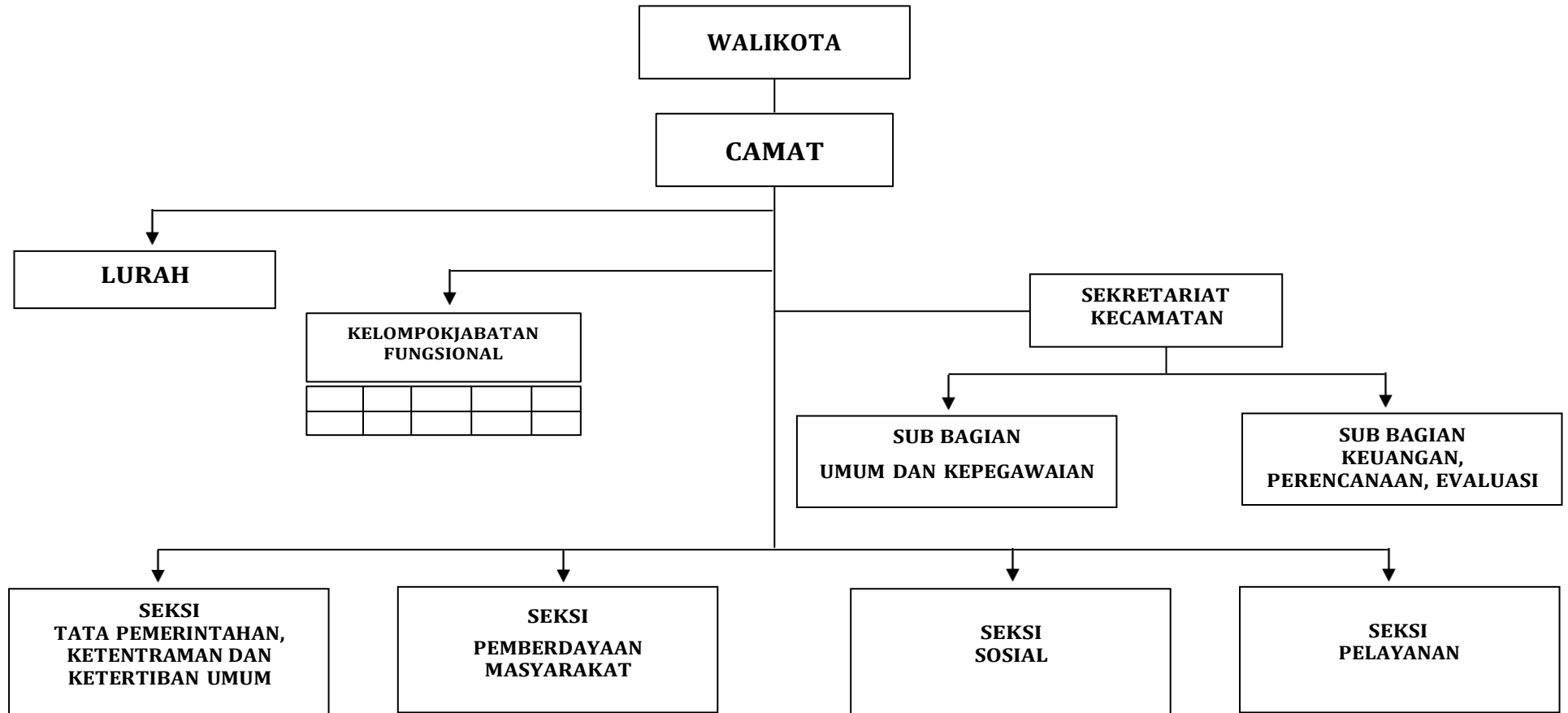
Seksi Pelayanan dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan, sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak dan perempuan di Kelurahan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

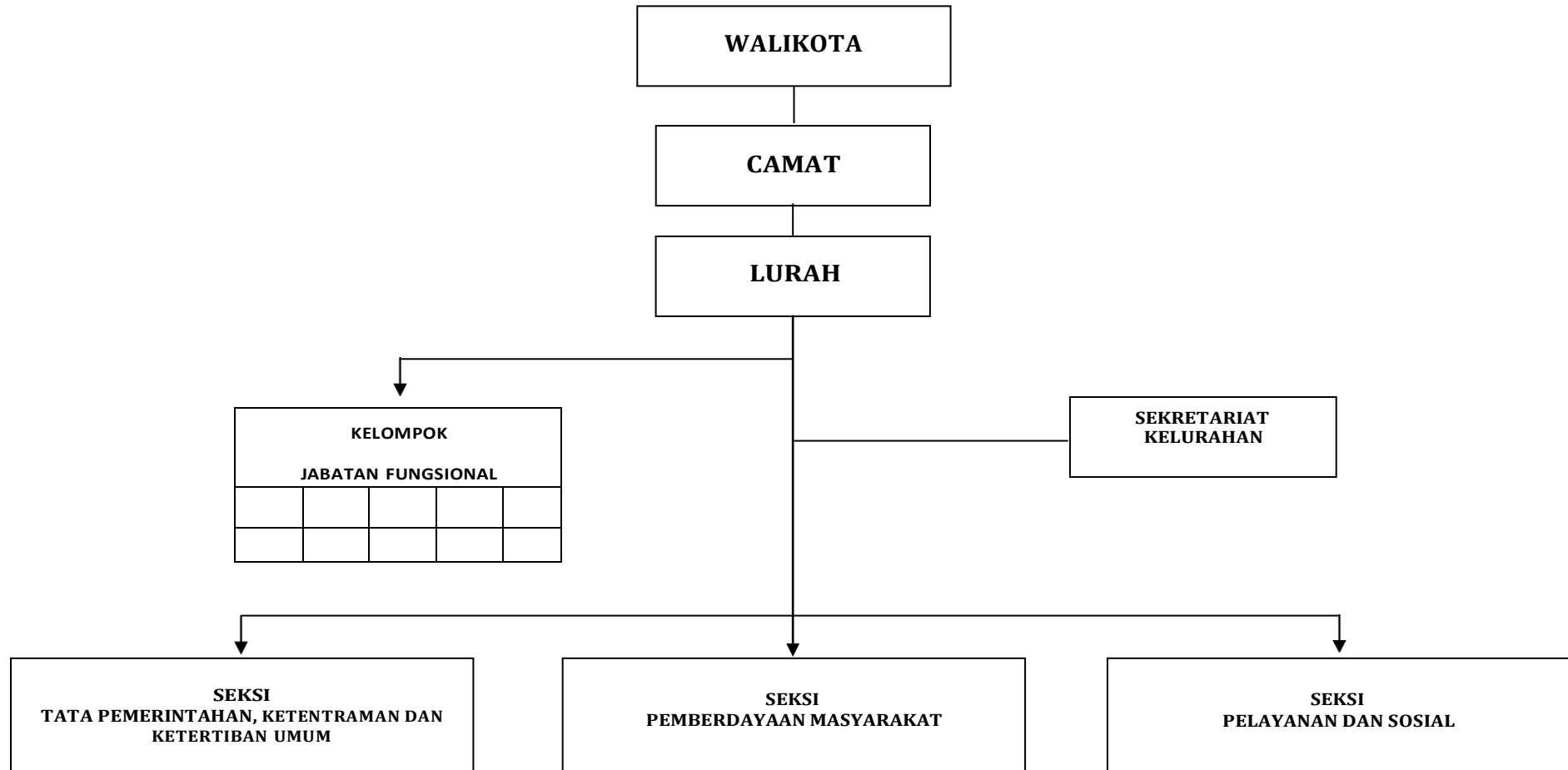
Gambar 1.1: STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



Gambar 1.2 : STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



3. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang didukung oleh sumber daya manusia yang berada di kecamatan dan kelurahan, seperti pada tabel berikut :

Tabel. 1.1

Data Pegawai ASN, Pegawai Honorer, Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat

No	Uraian	Lk	Pr	Jumlah
1.	Camat	1	-	1 orang
2.	Sekretaris Camat	-	1	1 orang
3.	Kepala Seksi di Kecamatan	2	2	4 orang
4.	Kasubbag di Kecamatan	1	1	2 orang
5.	Fungsional Umum di Kecamatan	4	1	5 orang
6.	Tenaga Honorer	-	2	2 orang
7.	Tenaga Harian Lepas Kecamatan:			
	- Operator	2	2	4 orang
	- Penjaga Kantor	1	-	1 orang
	- Sopir	2	-	2 orang
	- Petugas kebersihan Kantor	-	1	1 orang
8.	Lurah	8	-	8 orang
9.	Sekretaris Lurah	1	5	6 orang
10	Kasi di Kelurahan	10	9	19 orang
11	Fungsional Umum di Kelurahan	3	1	4 orang
12	Tenaga Harian Lepas di Kelurahan			
	- Operator	1	7	8 orang
	- Penjaga Kantor	7	-	7 orang
	- Petugas Kebersihan Kantor	2	6	8 orang
	Total	45	38	83 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Barat, Desember 2025

Berdasarkan Tabel di atas dapat dirinci personil/pegawai yang ada di kecamatan dan kelurahan keadaan Desember 2025 (tidak termasuk THL Kebersihan Lingkungan), sebagai berikut:

1. Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 23 personil yakni : ASN 13 orang, Tenaga Honorer 2 orang, THL Operator Komputer 4 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang, dan THL Sopir 2 orang.
2. Kelurahan Silaing Bawah sebanyak 6 personil yakni : ASN 4 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang.
3. Kelurahan Silaing Atas sebanyak 9 personil yakni : ASN 6 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang.
4. Kelurahan Pasar Usang sebanyak 8 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang.
5. Kelurahan Kampung Manggis sebanyak 8 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
6. Kelurahan Tanah Hitam sebanyak 8 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator

- Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
7. Kelurahan Balai Balai sebanyak 7 personil yakni : ASN 4 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
 8. Kelurahan Pasar Baru sebanyak 7 personil yakni : ASN 4 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
 9. Kelurahan Bukit Surungan sebanyak 9 personil yakni : ASN 6 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang

Tabel 1.2
Data Kepegawaian Menurut Golongan

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Golongan IV	02 orang	02 orang	04 orang
2	Golongan III	25 orang	20 orang	45 orang
3	Golongan II	04 orang	-	04 orang
4	Golongan I	-	-	-

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Barat, Desember 2025

Tabel 1.3
Data Kepegawaian Menurut Eselon

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Eselon III		01 orang	-
2	Eselon IV.a	10 orang	03 orang	13 orang
3	Eselon IV.b	15 orang	17 orang	32 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Barat, Desember 2025

Tabel 1.4
Data Kepegawaian Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Strata II	03 orang	03 orang	06 orang
2	Strata I	22 orang	17 orang	39 orang
3	Diploma III			
5	SLTA	04 orang	01 orang	05 orang
4	SLTP	-	-	-

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Barat, Desember 2025

4. ASPEK STRATEGIS KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan maka Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang secara umum memiliki fungsi strategis yaitu merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan. Dalam hal ini menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengupayakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan; melaksanakan administrasi kecamatan; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Analisa SWOT Kecamatan Padang Panjang Barat

a. Kekuatan (Strengths)

- Struktur Organisasi jelas dan lengkap

Kecamatan Padang Panjang Barat termasuk 8 Kelurahan yang berada dilingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat memiliki struktur organisasi yang lengkap, baik itu pejabat struktural di Kecamatan Padang Panjang Barat maupun di Kelurahan di Lingkup Kecamatan Padang Panjang Barat, walaupun ada jabatan yang dalam kondisi kosong di beberapa Kelurahan tetapi telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota tentang Pelaksana Tugas Jabatan yang kosong.

Tugas dan fungsi masing-masing bagian telah diuraikan dengan jelas dalam LKJIP.

- Realisasi Anggaran yang tinggi dan sesuai dengan target yang direncanakan dan sesuai prinsip *value for Money*.

Realisasi anggaran mencapai 90,83%, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana dimana Kecamatan Padang Panjang Barat telah menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam pengelolaan anggaran.

b. Kelemahan (Weakness)

- Minimnya pengetahuan mayoritas pejabat structural dalam teknologi terkhususnya pengoperasian computer, pemahaman tugas dan fungsi masing-masing jabatan.
- Masih kurangnya anggaran untuk pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan sarana dan prasarana serta pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung bangunan kantor
- Keterbatasan sarana dan prasarana peralatan yang menunjang administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat, khususnya Kelurahan.
- Pelatihan dan pengembangan kompetensi Pejabat Struktural di Kelurahan belum ada.

c. Peluang (Opportunity)

- Jumlah penduduk yang potensial
- Adanya sumber daya alam yang dapat diolah
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- Adanya pelimpahan sebagian wewenang dari Walikota kepada Camat

d. Ancaman (Threat)

- Keterbatasan Pagu Anggaran untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana beresiko terhadap output kinerja sasaran Kecamatan Padang Panjang Barat,
- Kondisi peralatan penunjang administrasi perkantoran beresiko dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat

- Pemahaman tentang tugas dan fungsi masing-masing pejabat structural beresiko penurunan kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat
- Organisasi masyarakat belum berfungsi secara optimal, dimana di Kecamatan Padang Panjang Barat memfasilitasi Lembaga-lembaga yang merupakan perpanjangan tangan dari Perangkat Daerah dalam pembangunan

5. RENCANA TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP OLEH INSPEKTORAT

Menindaklanjuti hasil evaluasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2025, Kecamatan Padang Panjang Barat telah melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan.

Beberapa langkah tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan antara lain:

1. Penyempurnaan Perencanaan Kinerja.

Dilakukan penajaman terhadap dokumen perencanaan seperti Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja Tahunan agar lebih selaras dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang terukur dan relevan.

2. Peningkatan Kualitas Indikator Kinerja.

Indikator kinerja yang sebelumnya belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dilakukan perbaikan agar lebih jelas dalam pengukuran capaian kinerja.

3. Penguatan Pengukuran dan Pelaporan Kinerja.

Dilakukan peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, serta konsistensi antara realisasi kinerja dengan pelaporan, sehingga laporan kinerja menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Pendukung.

Pemanfaatan sistem informasi kinerja (seperti e-SAKIP atau aplikasi sejenis) dioptimalkan untuk mendukung integrasi data perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

5. Peningkatan Kapasitas SDM.

Aparatur diberikan pembinaan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait penyusunan dokumen SAKIP agar pemahaman dan kompetensi dalam pengelolaan kinerja semakin meningkat.

6. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Internal.

Dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan target serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

7. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Spesifik LHE.

Setiap rekomendasi yang diberikan dalam LHE diinventarisasi dan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai dengan prioritas dan kemampuan perangkat daerah.

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INTERNAL
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025**

NO	REKOMENDASI		RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
1	A. Perencanaan Kinerja									
	1	Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan kinerja pada website Pemerintah Kota Padang Panjang	1	Melakukan upload data kinerja sesuai dengan data pada upload data esr kemenpan RB	1 website	B04	Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Proses	Telah dilakukan proses upload data kinerja sesuai dengan data upload esr kemenpan RB	Minimnya SDM yang mampu untuk membantu tugas perencanaan dan pelaporan
	2	Melakukan perbaikan penjejangkan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan Critical Succes Factor (CFS) dan Logical Framewok dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi	1	Melakukan perbaikan penjejangkan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan Critical Succes Factor (CFS) dan Logical Framewok dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi	1 laporan	B07	Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Proses	Koordinasi dengan pejabat struktural	Minimnya SDM dalam pemahaman CSF
	3	Memperbaharui crosscutting yang dapat menggambarkan hubungan keterkaitan antar bidang dalam menunjang pencapaian sasaran program	1	Melakukan pembaharuan crosscutting yang dapat menggambarkan hubungan keterkaitan antar bidang dalam menunjang pencapaian sasaran program	1 laporan	B07	Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Proses	Koordinasi dengan pejabat struktural	Minimnya SDM dalam pemahaman CSF
	B. Pengukuran Kinerja									
	1	Memperbaiki SOP Pengumpulan data keinerja yang memuat urian kegiatan rinci dalam rangka pengumpulan data	1	Melakukan perbaikan SOP Pengumpulan Data Kinerja	1 laporan	B07	Seksi Pelayanan	Proses	Koordinasi dengan Kasi Pelayanan	

	2	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai			1 Dokumen	B12	Sekretaris Kecamatan	Proses			
	C. Pelaporan Kinerja										
	1	Selalu mempedomani Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja	Rapat Evaluasi		1 Dokumen	B03	Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Proses			
	D. Evaluasi Internal										
	1	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang	Rapat Evaluasi Program Kegiatan		1 Dokumen	B10,B12	Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Proses	Identifikasi kinerja per Program	Kurang kerjasama dalam pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan melalui target kinerja per Perjanjian Kinerja	

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Kecamatan Padang Panjang Barat telah menyusun dan melaksanakan berbagai rencana aksi tindak lanjut yang mencakup aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Secara umum, seluruh rekomendasi telah berada pada tahap **proses pelaksanaan**, dengan beberapa kegiatan yang sudah mulai menunjukkan progres.

Pada aspek **perencanaan kinerja**, tindak lanjut difokuskan pada peningkatan transparansi dan kualitas dokumen perencanaan. Hal ini dilakukan melalui publikasi dokumen kinerja pada website Pemerintah Kota serta penyesuaian data kinerja dengan sistem e-SAKIP KemenPAN RB. Selain itu, dilakukan perbaikan penjenjangan kinerja (*cascading*) dari level pimpinan hingga operasional dengan mengacu pada *Critical Success Factor (CSF)* dan *Logical Framework*. Pembaruan *crosscutting* juga dilakukan untuk memperjelas keterkaitan antar bidang dalam pencapaian sasaran program. Namun, pelaksanaan kegiatan ini masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan SDM, khususnya dalam pemahaman konsep CSF dan pengelolaan perencanaan kinerja.

Pada aspek **pengukuran kinerja**, upaya perbaikan dilakukan melalui penyusunan dan penyempurnaan SOP pengumpulan data kinerja agar lebih sistematis dan rinci. Selain itu, hasil pengukuran kinerja mulai dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, seperti pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, serta pengembangan kompetensi ASN. Meski demikian, implementasinya masih dalam tahap proses dan memerlukan penguatan komitmen serta konsistensi.

Selanjutnya pada aspek **pelaporan kinerja**, penyusunan laporan kinerja telah diarahkan untuk selalu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Upaya ini dilakukan melalui rapat evaluasi dan koordinasi internal guna meningkatkan kualitas laporan agar lebih akuntabel dan sesuai standar.

Pada aspek **evaluasi internal**, Kecamatan Padang Panjang Barat berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat evaluasi program dan kegiatan serta identifikasi capaian kinerja per program. Namun, masih terdapat kendala berupa kurangnya koordinasi dan kerja sama antar bagian dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Secara keseluruhan, tindak lanjut hasil evaluasi AKIP telah berjalan sesuai rencana, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi internal, serta konsistensi dalam implementasi agar seluruh rekomendasi dapat diselesaikan secara optimal dan berdampak pada peningkatan nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Barat.

6. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan dasar dalam menentukan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis juga berkaitan dengan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada perencanaan tahun sebelumnya dan akan berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan selanjutnya. Oleh sebab itu maka perlu upaya untuk mengatasinya. Isu strategis yang disepakati dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang yang dari kebijakan pembangunan daerah (RPJP dan RPD).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja, Kecamatan Padang Panjang Barat masih menemui permasalahan utama (strategic issued) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat

B. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum mengenai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan memuat permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

Bab III: AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Dalam sub bab ini diuraikan capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.
- b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan anggaran yang tersedia dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas capaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.1 RENSTRA

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun atas dasar Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024 sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilu pada 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada untuk Tahun 2025 – 2029 untuk pembangunan Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat disesuaikan dengan RPJMD Kota Padang Panjang 2025 – 2029 yang diatur melalui Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Untuk lebih jelasnya ujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra 2025 – 2029 Kecamatan Padang Panjang Barat dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Kecamatan Padang Panjang Barat**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPPK = - Sasaran RPJMD = Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif		Indeks Pelayanan Publik	4.2	4.22	4.24	4.26	4.28	4.3	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Barat	69,25	69,35	69,45	69,55	69,65	69,75	
		Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	97,90	98,00	98,00	98,05	98,10	98,15	
		Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	39,99	40,00	40,05	40,10	40,15	40,20	

Sumber data : Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2025

Penyusunan RPD Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN 2025-2029 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Padang Panjang.

a. Visi dan Misi

Dalam penyusunannya, RPJMD Tahun 2025-2029 telah menyesuaikan dengan Visi RPJPD yaitu “Padang Panjang Kota Serambi Mekah Yang Maju, Sejahtera Dan Bermarwah” dengan 5 Misi yaitu :

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Kreatif dan Inovatif, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi;
- 2) Meningkatkan Perekonomian Daerah basis Potensi Lokal Melalui Penguatan Sektor Unggulan;
- 3) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani;
- 4) Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan Berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat dan Kearifan Lokal;
- 5) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan.

b. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dari Kecamatan Padang Panjang Barat yaitu ” **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif**”

c. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran dari Kecamatan Padang Panjang Barat terdiri dari 3 sasaran yaitu :

- Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah;
- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan;
- Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.

d. Sasaran sendiri biasa direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama 2025 – 2029 Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang:

- Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Barat;
- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat;
- Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat.

a. PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2025 Kecamatan Padang Panjang Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Camat Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 2025 – 2029.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 pada Sasaran 2 (dua) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target 97,85% , sebagaimana tertera dalam tabel Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 berikut ini:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	39,50%	1	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	39,99%
2	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	97,90	2	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	97,86
				3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Barat	69,25

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.383.814.088	11.183.329.000	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.479.596.129	1.432.692.023	
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.474.764.815	4.482.202.936	
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.477.000	12.643.800	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54.388.650	90.223.500	
	TOTAL	19.423.040.682	17.201.091.259	

Untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang terdapat perubahan sasaran dan target kinerja yaitu dari 2 sasaran strategis menjadi 3 sasaran karena adanya perubahan tujuan Kecamatan Padang Panjang Barat dimana tujuan awal Kecamatan Padang Panjang Barat adalah Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif sehingga sasaran menjadi 3 sasaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Barat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, seperti pada Tabel 3.1 berikut ini :**

Tabel 3.1

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Barat	69,25%	70,05%	101,15%
2	Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	97,86 %	93,15 %	95,19 %
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan / Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	39,99 %	40,01 %	100,05 %

➤ **Sasaran I “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah”.**

Sebagai Indikator Capaian Kinerja Sasaran yang diukur dengan Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Barat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan kinerja agar selaras dengan tujuan

pembangunan daerah, memperkuat pengukuran dan pelaporan kinerja yang terukur, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung peningkatan nilai AKIP sebagai cerminan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

➤ **Sasaran II “Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan”.**

Sebagai Indikator Capaian Kinerja Sasaran yang diukur dengan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Padang Panjang Barat sehingga Kecamatan Padang Panjang Barat dapat meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi Sumber daya Manusia, Sarana Prasarana Layanan, Prosedur Pelayanan serta mengembangkan inovasi-Inovasi terkait pelayanan Publik. Terdapat 9 Unsur yang dinilai, sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2025 hasil perhitungan nilai SKM setiap unsur pelayanan, mayoritas kinerja unsur pelayanan adalah Sangat Baik. Dari 9 unsur pelayanan yang ada, berada pada nilai kinerja unsur pelayanan Sangat Baik. Sehingga realisasi tahun 2025 ini memperoleh Nilai SKM sebesar 93,15% dari target yang ditetapkan sebesar 97,76% atau persen capaian sebesar 95,28%, namun masih dalam kategori mutu kinerja pelayanan Sangat Baik atau A, seperti dalam tabel berikut ini.

Rumus Penghitungan SKM:

$$\begin{aligned} \text{Total Nilai Interval Konversi IKM} \times 25 \text{ Total NIK IKM Tahun 2025} &= \\ 3.726 \times 25 & \\ = 93,15 / \text{SANGAT BAIK} & \end{aligned}$$

**Kelompok unsur Berdasarkan 9 ruang lingkup
Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang**

No	Unsur Pelayanan	NRR Per Butir Pertanyaan	Rata-Rata Per Unsur Pelayanan	Nilai SKM U9	Nilai IKM Konversi
1	Persyaratan layanan		3,700	92,50	0,411
1.1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis layanan	3,700			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan		3,733	93,33	0,414
2.1	Kemudahan prosedur pelayanan	3,733			
3	Waktu Penyelesaian Layanan		3,700	92,50	0,411
3.1	Kecepatan waktu penyelesaian layanan	3,700			
4	Biaya/Tarif		3,767	94,17	0,418
4.1	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,733			
4.2	Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan yang ditetapkan	3,800			
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan		3,667	91,67	0,407
5.1	Kesesuaian produk layanan antara yang tercantum dalam Standar Pelayanan dengan Pelayanan yang diberikan	3,667			
6	Kompetensi Pelaksana		3,733	93,33	0,414
6.1	Kompetensi/kemampuan petugas dalam melayani	3,733			
7	Perilaku Pelaksana		3,867	96,67	0,429
7.1	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dalam pelayanan	3,867			
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan		3,700	92,50	0,411
8.1	Penanganan pengaduan	3,500			
8.2	Alasan tidak melakukan proses pengaduan	3,900			
9	Sarana dan Prasarana		3,700	92,50	0,411
9.1	Kelengkapan sarana/prasarana	3,633			
9.2	Kemudahan mendapatkan informasi setiap jenis layanan	3,700			
9.3	Kebersihan lingkungan layanan	3,767			
	TOTAL	48,433	33,567		3,726
	Nilai IKM Unit Layanan	93,15			
	Mutu	A			
	Kinerja Pelayanan	Sangat Baik			

Sumber Data : Laporan Hasil SKM Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, 2024

Adapun produk layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat yang diberikan kepadamasyarakat sebanyak 8 (delapan) Layanan pada tahun 2025, yaitu :

1. Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
2. Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
3. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris Kepemilikan Tanah dan Surat Ahli WarisPensiunan PNS
4. Legalisasi Surat Susunan Keluarga untuk Pensiunan PNS
5. Legalisasi Surat Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP)
6. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Legalisasi Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)
8. Legalisasi Keterangan Domisili

➤ **Sasaran III : “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan”.**

Untuk pencapaian Target Sasaran Pertama dengan Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dengan Definisi Operasional: “Perbandingan Jumlah Anggaran Partisipasi (2025) dengan Total Belanja Langsung Kecamatan dan Kelurahan (2025) dan dinyatakan dalam persentase”.

Dengan Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran Partisipasi}}{\text{Total Belanja Langsung Kecamatan Dan Kelurahan}} \times 39,99\%$$

$$\frac{\text{Rp. 6.035.100.000,00}}{\text{Rp. 6.017.762.259,00}} \times 39,99\%$$

$$= 40,01\%$$

(Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2025)

Yang dimaksud dengan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan yaitu keseluruhan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan di tahun berjalan, sedangkan untuk anggaran partisipasi dihitung dengan asumsi/perkiraan dana/anggaran partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan seperti:

- Kehadiran rapat kelurahan
- Kehadiran musrenbang RT
- Kehadiran musrenbang Kelurahan
- Kehadiran musrenbang Kecamatan

- Lomba
- Lomba Kel Berprestasi
- Pelatihan Keolahragaan Kelurahan
- Kegiatan Seni dan Olahraga Kelurahan
- Pelatihan di Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat
- Goro persiapan untuk kegiatan Qurban
- Kegiatan gotong royong lainnya yang melibatkan masyarakat di RT, Kelurahan dan Kecamatan
- dan lain-lain.

Untuk realisasi tahun 2025 pencapaian Sasaran Strategis Pertama dengan Indikator Sasaran “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dengan target sebesar 39.99% dan realisasi sebesar 40,01% dengan capaian realisasi 95,28%. Faktor pengungkit dari pencapaian ini masih cukup tingginya kepedulian masyarakat seperti tahun sebelumnya dalam ikut berpartisipasi seperti kegiatan gotong royong, kegiatan perlombaan dan lain-lain serta keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan diwilayah Kecamatan Padang Panjang Barat.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun berikutnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Barat	NA	-	-	NA	-	-	69,25	69,15	99,86
2	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	97,85	93,90	95,96	97,85	97,75	99,90	97,76	93,15	95,28
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	39,20	32,44	82,75	39,20	38,36	97,86	39,99	40,01	100,05

Untuk pencapaian sasaran strategis kedua dari target dengan indikator sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Barat pada Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 97,76% , berhasil dicapai adalah sebesar 93,15% dengan kategori “Sangat Baik”. Artinya Persentase Capaian Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2025 adalah sebesar 95,28 %. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kinerja layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat sedikit menurun dari tahun 2024 walaupun untuk Nilai SKM Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Nilai Sangat Baik

Pada tahun 2025 hasil perhitungan nilai SKM setiap unsur pelayanan, mayoritas kinerja unsur pelayanan adalah Sangat Baik. Dari 17 unsur pelayanan yang ada, terdapat 15 unsur pelayanan yang berada pada nilai kinerja unsur pelayanan Sangat Baik, 1 unsur pelayanan lainnya masuk dalam kategori kinerja unsur pelayanan Baik dan 1 unsur yang termasuk dalam kinerja unsur pelayanan Kurang Baik. Sehingga realisasi tahun 2024 ini memperoleh Nilai SKM sebesar 97,75 dari target yang ditetapkan sebesar 97,85% atau persen capaian sebesar 99,90%, namun masih dalam kategori mutu kinerja pelayanan Sangat Baik atau A

Sedangkan untuk pencapaian Sasaran Strategis Ketiga dengan Indikator Sasaran “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dengan target sebesar 39.99% dan realisasi sebesar 40,01% dengan capaian realisasi 100.05%. Faktor penguangkit dari pencapaian ini masih cukup tingginya kepedulian masyarakat seperti tahun sebelumnya dalam ikut berpartisipasi seperti kegiatan gotong royong, kegiatan perlombaan dan lain-lain serta keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan diwilayah Kecamatan Padang Panjang Barat.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Yang Akan Dicapai Pada Akhir Periode Renstra OPD (Tahun 2030) seperti pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra (per Sasaran Strategis)

SASARAN STRATEGIS I : “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah”

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Barat	70,05%	69,65%	100,57

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel Indikator dari Sasaran I (satu) yaitu “Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Barat” dengan realisasi sebesar 70,05 % dari target 69,25% dengan capaian 101,15 %. Realisasi pada indikator ini cukup tinggi hamper mencapai target didukung

dengan penilaian Akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat ditiap indicator penilaian mendekati batas nilai yang ditetapkan dalam sistim akuntabilitas kinerja.

SASARAN STRATEGIS II : “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan Dan Kelurahan”

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,15%	97,81	95,28

Tabel indikator dari sasaran II (dua) yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target 97,76 dengan realisasi 93,15 atau persentase capaian 95,28%. Nilai SKM untuk Kecamatan Padang Panjang Barat walaupun tidak sesuai dengan target tetapi masih dinilai dengan prediket sangat baik (A), hal ini bisa dicapai dengan nilai yang tinggi karena dari 9 unsur pelayanan yang dinilai, rata rata semua unsur sudah mendekati untuk memenuhi syarat untuk pelayanan masyarakat

SASARAN STRATEGIS III : “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan”

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan /Kelurahan	39,99%	40,20%	96,38 %

Tabel Indikator dari Sasaran III (tiga) yaitu “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan” dengan realisasi sebesar 40,01 % dari target 39,99 % dengan capaian 100,05 %.

Tingginya realisasi pencapaian pada sasaran ketiga ini didukung dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik itu dalam kegiatan gotong royong masyarakat, kegiatan pelatihan, maupun kegiatan keagamaan.

Dari ketiga tabel ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Barat telah berhasil dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran strategis yang telah di tetapkan pada awal tahun RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2029.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah.
- c. Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal;
- e. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan peran lembaga masyarakat merupakan faktor terpenting dalam pencapaian sasaran kinerja di Kecamatan Padang Panjang Barat

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Barat;
2. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran;

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukanusaha-usaha sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan alur pengaduan langsung terhadap masyarakat;
2. Membuat Standar Pelayanan setiap jenis layanan;
3. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat;
4. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Padang Panjang Barat ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik

Aspek	Pendorong keberhasilan	Penghambat/ kegagalan	Rencana Tindak Lanjut
SDM	Adanya partisipasi lembaga kemasayarakatan di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat	Pengetahuan Pejabat structural tentang tugas dan fungsi serta pengetahuan tentang pengoperasian computer	Bimbingan teknis peningkatan kompetensi SDM
Kegiatan	- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Pembangunan Sarana	Keterbatasan anggaran	Usulan penambahan pagu anggaran

	dan Prasarana di Kelurahan		
Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey kepuasan masyarakat dengan nilai tinggi	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung mencapai nilai sempurna untuk SKM	Pengadaan sarana prasarana pendukung administrasi perkantoran

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

5.1. Efisiensi Sumber Daya Manusia

a. Komposisi dan Kualifikasi SDM

- Sumber daya manusia yang berada dilingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat 95 orang yang terdiri dari 53 orang PNS, 2 orang Pegawai Honorer, 40 orang Tenaga Harian Lepas.
- Sebaran Golongan, mayoritas Golongan III (89,83%) yang merupakan Pegawai dengan Jabatan Struktural dan Fungsional Umum
- Tingkat Pendidikan, Mayoritas berijazah Sarjana (S1) yang merupakan Pejabat Struktural

b. Efisiensi dan Permasalahan SDM

- Keunggulan, Struktur organisasi cukup lengkap dengan pembagian tugas yang jelas. Kualifikasi pendidikan cukup baik, dengan mayoritas pegawai berpendidikan tinggi.
- Kelemahan, untuk pejabat Struktural yang berada di lingkungan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat, kebanyakan tidak menguasai pengoperasian computer serta kurang memahami tugas dan fungsi mereka sebagai pejabat structural, sehingga terkendala dalam menyampaikan dan melaksanakan tugas dan butuh bantuan dari Tenaga Harian Lepas (Operator) untuk pengoperasian computer dan pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelurahan

c. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efisiensi SDM

- Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.

5.2. Efisiensi Sumber Daya Keuangan

a. Alokasi dan Realisasi Anggaran

- Total Anggaran Rp. 17.201.533.588,00 dengan realisasi Rp. 15.623.459.865,00 (90,83%)
- Distribusi Anggaran :
 - Rp.10.402.949.021,00 (66,58%) untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Rp.1.240.290.825,00 (7,94%) untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Rp.3.975.370.326,00 (25,44%) untuk Prgram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Rp.1.350.000,00 (0.01%) untuk Program Koordinasi dan Ketertiban Umum

Rp.4.106.025,00 (0.03%) untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

b. Efisiensi dan Permasalahan Anggaran

- Keunggulan

Realisasi anggaran mencapai 90,83% menunjukkan efektifitas dalam perencanaan dan penggunaan anggaran

Kegiatan Administrasi Perkantoran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai dengan perencanaan dan target.

- Kelemahan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat belum optimal, dimana untuk kegiatan pelatihan dan Pembangunan sarana dan prasarana masih minim anggaran

c. Rekomendasi untuk meningkatkan Efisiensi Anggaran

- Strategi Perbaikan

Mengusulkan untuk pelaksanaan anggaran tahun berikutnya dalam hal pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mengoptimalkan usulan Masyarakat untuk prioritas pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

5.3. Efisiensi Sarana dan Prasarana

a. Kondisi Sarana dan Prasarana

- Beberapa fasilitas pendukung belum optimal, terutama perangkat elektronik seperti laptop, printer, proyektor, mobiler dan peralatan kerja lainnya.
- Anggaran pemeliharaan kendaraan dinas, Gedung bangunan dan fasilitas kantor telah terealisasi, tetapi masih ada kekurangan dalam pagu untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Bangunan Kantor terkhusus untuk pemeliharaan di beberapa kantor lurah karena adanya refocusing anggaran 2025
- Belum ada anggaran yang dialokasikan untuk Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor, mobiler kantor, proyektor, dan lain lain yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam perencanaan pagu anggaran kebutuhan fasilitas kerja.

b. Efisiensi Permasalahan Sarana dan Prasarana

- Keunggulan

Rehabilitasi gedung dan bangunan kantor telah terealisasi dengan baik dengan capaian 96,13 %, kegiatan social terlaksana dengan baik dan mendekati target dengan capaian 91,14%

Kebutuhan dasar operasional masih terpenuhi, tetapi masih ada

pemeliharaan yang membutuhkan pagu anggaran lebih khususnya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung bangunan kantor

- Kelemahan

Minimnya peralatan kerja menyebabkan penurunan efisiensi operasional

Kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam tupoksi masing-masing dan juga fasilitas pendukung, seperti peralatan computer untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran.

c. Rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi sarana dan prasarana

- Strategi perbaikan

- Mengusulkan untuk meningkatkan pagu anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung bangunan kantor.

- Mengalokasikan dana untuk relokasi bangunan Gedung kantor untuk kelurahan Balai-Balai atau Rehabilitasi Berat untuk bangunan Gedung Kantor Lurah Balai Balai

- Mengusulkan anggaran untuk pengadaan peralatan yang menunjang administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat.

5.4. Kesimpulan dan Rekomendasi Utama

Untuk mencapai tujuan Kecamatan Padang Panjang Barat yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah serta sasaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan dan kecamatan, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Tabel. 3.4
Analisis Efisiensi Sumber Daya

Aspek	Keunggulan	Permasalahan	Rekomendasi
SDM	Struktur organisasi cukup lengkap dengan pembagian tugas yang jelas. Kualifikasi pendidikan cukup baik, dengan mayoritas pegawai berpendidikan tinggi.	Untuk pejabat Struktural yang berada di lingkungan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat, kebanyakan tidak menguasai pengoperasian computer serta kurang memahami tugas dan fungsi mereka sebagai pejabat structural, sehingga terkendala dalam menyampaikan dan melaksanakan tugas dan butuh bantuan dari Tenaga Harian Lepas (Operator)	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.

Aspek	Keunggulan	Permasalahan	Rekomendasi
		untuk pengoperasian computer dan pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelurahan	
Anggaran	Realisasi anggaran mencapai 90,83% menunjukkan efektifitas dalam perencanaan dan penggunaan anggaran Kegiatan Administrasi Perkantoran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai dengan perencanaan dan target.	Dukungan anggaran untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat belum optimal, dimana untuk kegiatan pelatihan dan Pembangunan sarana dan prasarana masih minim anggaran	Mengusulkan untuk pelaksanaan anggaran tahun berikutnya dalam hal pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mengoptimalkan usulan Masyarakat untuk prioritas pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.
Sarana dan Prasaarana	pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung dan bangunan kantor dengan capaian realisasi 96,13% Kebutuhan dasar operasional masih terpenuhi, tetapi masih ada pemeliharaan yang membutuhkan pagu anggaran lebih khususnya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung bangunan kantor	Minimnya peralatan kerja menyebabkan penurunan efisiensi operasional Kurangnya dukungan fasilitas pendukung, seperti peralatan computer untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran.	Mengusulkan untuk meningkatkan pagu anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung bangunan kantor. Mengalokasikan dana untuk relokasi bangunan Gedung kantor untuk kelurahan Balai-Balai atau Rehabilitasi Berat untuk bangunan Gedung Kantor Lurah Balai Balai Mengusulkan anggaran untuk pengadaan peralatan yang menunjang administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Pencapaian target kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan dipengaruhi oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Secara umum, beberapa program dan kegiatan telah memberikan kontribusi positif terhadap capaian indikator kinerja, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

6.1. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja antara lain :

- a. **Peningkatan Pelayanan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan**
Kegiatan pelayanan administrasi seperti penerbitan rekomendasi, legalisasi dokumen, serta pelayanan administrasi kependudukan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini turut mendukung peningkatan **nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)** terhadap layanan kecamatan.
- b. **Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**
Pelaksanaan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, seperti LPM, PKK, Karang Taruna, dan kelompok masyarakat lainnya, turut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan dan kelurahan.
- c. **Kegiatan Gotong Royong dan Pemberdayaan Masyarakat**
Kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong lingkungan, program kebersihan, serta berbagai kegiatan partisipatif lainnya mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan.
- d. **Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan**
Kegiatan koordinasi antara kecamatan dengan kelurahan serta instansi terkait mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

6.2. Program/Kegiatan yang Belum Optimal Mendukung Pencapaian Kinerja

Meskipun sebagian besar kegiatan telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pencapaian kinerja belum optimal, antara lain:

- a. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana Operasional**
Keterbatasan sarana pendukung, khususnya dalam kegiatan pelayanan dan pengawasan di wilayah kelurahan, masih menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. **Partisipasi Masyarakat yang Belum Merata**
Walaupun partisipasi masyarakat menunjukkan peningkatan, namun keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih belum merata di seluruh wilayah kelurahan.
- c. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia**
Jumlah dan kapasitas aparatur yang terbatas pada beberapa bidang turut mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. **Koordinasi dengan Beberapa Stakeholder yang Belum Maksimal**
Dalam beberapa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, koordinasi lintas sektor masih perlu ditingkatkan agar program dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

6.3. Upaya Perbaikan

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya, Kecamatan Padang Panjang Barat akan melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan dan pemanfaatan teknologi;
- b. memperkuat koordinasi dengan kelurahan dan perangkat daerah terkait;
- c. meningkatkan pembinaan serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat dapat terus meningkat dan memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang memiliki fungsi sebagai penunjang urusan pemerintah, yaitu urusan Urusan Wajib, Urusan Pemerintahan Umum mendapat alokasi anggaran di tahun 2025 sebesar Rp. 17.201.533.588,00 dan realisasi sebesar Rp. 15.624.066.197 atau 90,13 %. Dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Dengan realisasi Program, Kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota total dana sebesar Rp. 11.183.771.329,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 10.402.342.689,00 (93,02%) dengan kegiatan :
 - a) Kegiatan Administrasi Keuangan dengan dana sebesar Rp. 7.954.113.278,00 realiasi keuangan sebesar Rp. 7.814.931.221,00 (98,25%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 7.954.113.278,00 Kegiatan ini bertujuan untuk membayarkan Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS dan pembayaran honorarium Pengguna Anggaran di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat. Realissi Fisik. Subkegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.814.931.221,00 (98,25%) Hasil subkegiatan ini berupa terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS serta honorarium Pelaksanaan penatausahaan di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat dengan jumlah PNS kondisi 31 Desember 2025 adalah sebanyak 54 orang
 - b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan dana sebesar Rp.341.549.767,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 195.069.357,00 (57,11%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 17.914.250,00. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang penerangan kantor Realisasi Fisik kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.231.900,00 (79,44%).
Hasil kegiatan ini berupa alat-alat listrik di Kantor Camat Padang Panjang Barat

- dan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 83.565.017,00. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran, terlaksananya kebersihan perkantoran. Realisasi Fisik Subkegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 65.326.505 (78.17%). Hasil kegiatan ini berupa tersedianya Alat tulis kantor, peralatan penunjang computer, alat kebersihan di Kantor Camat Padang Panjang Barat dan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 27.402.500,00. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan administrasi perkantoran. Realisasi Fisik Subkegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp 11.614.550,00 (42.39%). Hasil kegiatan ini berupa tersedianya barang cetakan dan penggandaan (spanduk, fotocopy surat menyurat, Jilid DPA, DPPA 2025, Cetak Map) di Kantor Camat Padang Panjang Barat dan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat
 4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 212.668.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di dalam maupun luar kota dan luar daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran. Realisasi Fisik kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 103.896.402,00 (48,85%). Hasil kegiatan ini berupa Rapat Koordinasi, pelaksanaan gotong royong di Kantor Camat Padang Panjang Barat dan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat serta Rapat Koordinasi keluar Kota dan Luar Propinsi Sumatera Barat
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dana sebesar Rp. 2.368.071.284,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.1.978.981.271,00 (83,57%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 920.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk pelayanan surat menyurat kantor. Realisasi Fisik kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 920.000,00 (100%). Hasil kegiatan ini tersedianya materai di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat.
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 102.156.084,00. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi tagihan listrik, air dan retribusi sampah di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat. Realisasi Fisik kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.028.772,00 (51,91%). Hasil dari kegiatan ini berupa pembayaran retribusi kebersihan, tagihan air dan listrik di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.264.995.200,00. Kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran Honor dan penggantian transport Pegawai Administrasi dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.925.032.499,00 (84,99%). Hasil kegiatan ini terbayarnya honor 2 (dua) orang Pegawai Harian, 11 (Dua belas) orang Operator Kecamatan dan Kelurahan, 8 (delapan) orang Petugas Kebersihan kantor, 21 petugas kebersihan lapangan, 2 (dua) orang sopir dan 8 (sembilan) orang Penjaga Kantor Kelurahan dan Kecamatan.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dana sebesar Rp. 495.037.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 413.360.840,00 (83,50%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 159.895.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional (roda dua dan roda empat). Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.115.221.800,00 (72,06%). Hasil kegiatan ini berupa terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional sebanyak 21 unit kendaraan dinas dan operasional di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat.
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 47.710.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan gedung kantor. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.845.000,00 (45,79%). Hasil kegiatan ini terpeliharanya peralatan dan mesin kantor Kelurahan dan Kecamatan (Printer, Komputer, Laptop, CCTV, Meja, Kursi, Lemari) dan dapat dibayarkannya belanja jasa non pegawai (upah) Kecamatan dan Kelurahan selama 1 tahun.
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 0,00. Kegiatan ini bertujuan untuk Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 0 % realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0%).
 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.287.432.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 276.294.040,00 (96,13%). Hasil kegiatan ini berupa telah terpeliharanya Gedung Kantor Camat Padang Panjang Barat, Rumah Dinas Camat Padang Panjang Barat serta Gedung Kantor Lurah se Kecamatan Padang Panjang Barat yang menjadi asset Kecamatan Padang Panjang Barat
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan dana sebesar Rp 1.432.692.023,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.240.290.825,00

(86,57%) dengan subkegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan dana sebesar Rp. 285.491.900,00 realisasi keuangan sebesar Rp.194.707.550,00 (68,20%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan dana sebesar Rp 285.491.900,00. Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan fasilitas umum di wilayah masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 194.707.550,00 (68,20%). Hasil kegiatan ini berupa Pemeliharaan Kendaraan Roda Tiga, pembayaran pajak Becak Motor, penyediaan penggantian transport diluar jam kerja dan Tersedianya bahan dan perlengkapan kebersihan lapangan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat.
- b) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan dana sebesar Rp. 1.147.200.123,00 realisasi keuangan sebesar Rp.1.045.583.275,00 (91,14%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan dana sebesar Rp.1.147.200.123,00 Kegiatan ini bertujuan untuk Pembinaan Karang Taruna, Kader Posyandu serta Pokja Sehat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.045.583.275,00 (91,14%). Hasil Kegiatan ini berupa pembayaran Honor Kader Posyandu, Honor Kader Dasawisma, Lomba Kader Posyandu dan Pemberian Makan Tambahan untuk Balita, Pembinaan Pokja Sehat dan Karang Taruna.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan dana sebesar Rp.4.482.202.936,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 3.975.370.326,00 (88,69%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan dana sebesar Rp.2.175.282.936,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.682.230.337,00 (77,33%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 173.714.850,00. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 132.199.115,00 (76,10%). Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan
 2. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 293.560.200,00 Kegiatan ini bertujuan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 80 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.76.694.700,00 (26,13%). Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya

Pembangunan Sarana di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat berupa tersedianya sarana dan prasarana KSB Kelurahan dan Pompa air di Kelurahan Bukit Surungan

3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 1.708.007.886,00. Kegiatan ini bertujuan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 90 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.473.336.522,00 (86,26%). Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa pelatihan Pembuatan buket bunga, pelatihan membuat payet, pelatihan penyelenggaraan sholat jenazah, pelatihan tata rias, pelatihan sepakbola dan pelatihan videography bagi masyarakat di wilayah masing-masing Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat, Pembayaran Honor Kader Dasawisma, Lomba Dasawisma, Lomba LPM Berprestasi Pembinaan dan Pembayaran Honor LPM, Posyantek di Kelurahan.
- b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan dana sebesar Rp. 2.306.920.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 2.293.139.989,00 (99,40%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 2.306.920.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Kegiatan RT dan LPM. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.293.139.989,00 (99,40%) Hasil kegiatan ini berupa terlaksananya pembayaran Honor Perangkat RT dan makan minum kegiatan RT se Kecamatan Padang Panjang Barat.
- 4) Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan dana sebesar Rp.12.643.800,00 realisasi keuangan sebesar Rp.1.350.000,00 (10,68%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan dana sebesar Rp. 12.643.800,00 realisasi keuangan sebesar Rp.1.350.000,00 (10,68%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan dana sebesar Rp. 12.643.800,00. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi FKPM Kecamatan Padang Panjang Barat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.350.000,00 (10,68%). Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya Koordinasi antar Babin Kelurahan dan Kecamatan dalam mencegah tindak kejahatan di wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan dana sebesar Rp.90.223.500,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 4.106.025,00 (4,55%) dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan dana sebesar Rp.90.223.500,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 4.105.250 (89,65%) dengan subkegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dengan dana sebesar Rp. 0,,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 (0%).
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan dana sebesar Rp. 90.223.500,00 Kegiatan ini bertujuan untuk dijalankannya kegiatan Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kamtibmas di Kecamatan. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.105.250 (4,55%) Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya Rapat Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kamtibmas di Kecamatan yang dilaksanakan per triwulan selama Tahun 2025 dan kegiatan memeriahkan Hari Jadi Kota Padang Panjang.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Padang Panjang Barat

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
38.	Kewilayahan	Kecamatan Padang Panjang Barat	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90	90	100		
				Jumlah dana	11.183.771.329	10.402.342.689	93,01		
			a). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	90	90	100		
				Jumlah dana	11.183.771.329	10.402.342.689	93,01		
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	798 orang	764 orang	95,73	Adanya PNS yang mutasi ke OPD lain, adanya PNS yang pensiun	Permintaan tambahan PNS ke OPD Kecamatan Padang Panjang Barat
				Jumlah dana	11.183.771.329	10.402.342.689	93,01		
			b). Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	90	100		
				Jumlah dana	341.549.767	195.069.357	57,11		
			- Penyediaan	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 jenis komponen peralatan listrik	1 jenis komponen peralatan listrik	100		

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dana	17.914.250	14.231.900	79,44	
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan	10 jenis komponen bahan logistik yang diadakan	10 jenis komponen bahan logistik yang diadakan	100	
				jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	83.565.017	65.326.505	78,17	
			- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dana	27.402.500	11.614.550	42,39	
				Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	2 jenis komponen barang yang dicetak dan diadakan Fotocopy , jilid, cetak map, cetak amplop	2 jenis komponen barang yang dicetak dan diadakan Fotocopy , jilid, cetak map, cetak amplop	100	
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dana	212.668.000	103.896.402	48,85	
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 laporan	24 laporan	100	
			c) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100	100	100	
				Jumlah dana	145.558.000	142.980.000	98,23	
			- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit (Camera CCTV)	0 unit	75	
				Jumlah dana	25.000.000	0	0	

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi pada kecamatan Padang Panjang Barat	3 Jenis Urusan (Jasa Kantor, Jasa Surat Menyurat, Pelayanan Umum)	3 Jenis Urusan (Jasa Kantor, Jasa Surat Menyurat, Pelayanan Umum)	100	
				Jumlah dana	2.368.071.284	1.978.981.271	83,57	
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100	
				Jumlah dana	920.000	920.000	100	
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan asa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 laporan	24 laporan	100	
				Jumlah dana	102.156.084	53.028.772	51,91	
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	108 laporan	108 laporan	100	
				Jumlah dana	2.264.995.200	1.925.032.499	84,99	
			e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	24 jenis peralatan dan mesin, 13 unit gedung, 47 unit kendaraan dinas	24 jenis peralatan dan mesin, 13 unit gedung, 21 unit kendaraan dinas	70	Adanya pengurangan kendaraan dinas/operasional OPD
				Jumlah dana	495.037.000	413.360.840	83,50	
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan yang dipelihara, jumlah BBM yang disediakan, jumlah	2 kendaraan dinas beroda 4, 36 kendaraan dinas	2 kendaraan dinas beroda 4, 19 kendaraan dinas	55	Adanya pengurangan kendaraan
								Menyesuaikan kembali target untuk tahun 2026

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajak kendaraan yang dibayarkan	beroda 2	beroda 2	dinas/operasional OPD	
				Jumlah dana	159.895.000	115.221.800	72,06	
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	21 jenis peralatan	21 jenis peralatan	100	
				Jumlah dana	47.710.000	21.845.000	45,79	
			- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	0 gedung	0 gedung	0	
				Jumlah dana	0	0	0	Refocusing anggaran
			- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	9 unit	9 unit	100	
				Jumlah dana	287.432.000	276.294.040	96,13	
			2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100%	100%	100	
				Jumlah dana	1.432.692.023	1.240.290.825	86,57	
			a) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	4 koordinasi	4 koordinasi	100	
				Jumlah dana	285.491.900	194.707.550	68,20	

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	680 dokumen	680 dokumen	100		
				Jumlah dana	285.491.900	194.707.550	68,20		
			b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelimpahan Urusan yang dilaksanakan	8 jenis urusan (Forum Kecamatan Sehat, Pokja Sehat, Posyandu, , Karang Taruna)	8 jenis urusan (Forum Kecamatan Sehat, Pokja Sehat, Posyandu, Karang Taruna)	100		
				Jumlah dana	1.147.200.123	1.045.583.275	91,14		
			- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Forum, 8 Pokja Sehat 1 kegiatan lomba Posyandu 275 kader 28.663 target PMT	1 Forum, 8 Pokja Sehat 1 kegiatan lomba Posyandu 275 kader 28.663 target PMT	100		
				Jumlah dana	2.562.482.400	2.484.082.108	91,14		
			3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	27 %	26,42 %	97,85	Partisipasi masyarakat sudah dilaksanakan secara maksimal	
				Jumlah dana	4.482.202.936	3.975.370.326	88,69		

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a) Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 Jenis Pemberdayaan (Musrenbang, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Sarana dan Prasarana)	3 Jenis Pemberdayaan (Musrenbang, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Sarana dan Prasarana)	100		
				Jumlah dana	2.175.282.936	1.682.230.337	77,33		
			- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	8 Kegiatan Musrenbang Kelurahan, 1 Kegiatan Musrenbang Kecamatan	8 Kegiatan Musrenbang Kelurahan, 1 Kegiatan Musrenbang Kecamatan	100		
				Jumlah dana	173.714.850	132.199.115	76,10		
			- Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Lokasi Pembangunan yang dilaksanakan	5 Lokasi (Kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu, Pengadaan Bentor, Pengadaan Sarana Prasarana KSB, Pengadaan Mobiler Poskeskel Kelurahan, Rehabilitasi Pustu, Pengadaan Pomba Air)	5 Lokasi (Pengadaan Bentor, Pengadaan Sarana Prasarana KSB, Pengadaan Pomba air)	50	Pengadaan sarana dan prasana posyandu tidak dilaksanakan karena sapsras yang akan diadakan tidak sesuai antara kebutuhan dan yang tersedia di DPA, Pengadaan Mobiler Poskeskel Kelurahan dan Rehab Pustu tidak dilaksanakan	Untuk tahun berikutnya jika ada usulan musrenbang pengadaan sapsras untuk OPD yang bukan OPD Kecamatan Padang Panjang Barat, diusulkan untuk diarahkan ke OPD terkait

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
								karena bukaan asset Kecamatan Padang Panjang Barat	
				Jumlah dana	293.560.200	76.694.700	26,13		
			- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas 11 Kegiatan Pelatihan, 2 kegiatan kesenian dan keolahragaan	8 Pokmas 6 Kegiatan Pelatihan, 0kegiatan kesenian dan keolahragaan	66,67	Kegiatan Pelatihan ecobrick, pelatihan berbahan kulit, pelatihan penanggulangan kebakaran, pelatihan UMKM Digital, Pelatihan pembuatan kue basah, Event Car freeday, Kegiatan Lomba bercerita tidak dilaksanakan, karena kekurangan anggaran pada refocusing awal dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan pada Usulan Musrenbang 2024	Untuk pelaksanaan kegiatan yang merupakan usulan musrenbang diusulkan untuk tahun berikutnya tidak ada refocusing anggaran
				Jumlah dana	1.708.007.886	1.4173.336.522	86,26		
			b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT yang difasilitasi	134 RT	134 RT	100		
				Jumlah dana	2.306.920.000	2.293.139.989	99,40		

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100		
				Jumlah dana	2.306.920.000	2.293.139.989	99,40		
			4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat	10 Laporan	10 Laporan	100	Belanja pada Rekening Penggantian Transport FKPM Kelurahan tidak dilaksanakan secara menyeluruh, karena tidak terjadi tindakan kriminalitas di beberapa bulan terakhir	Pengurangan Pagu Anggaran Penggantian Transpot untuk Tahun berikutnya
				Jumlah dana	12.643.800	1.350.000	10,68		
			a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib	2 jenis	2 jenis	100		
				Jumlah dana	12.643.800	1.350.000	10,68	Belanja pada Rekening Penggantian Transport FKPM Kelurahan tidak dilaksanakan secara menyeluruh, karena tidak terjadi tindakan kriminalitas di	Pengurangan Pagu Anggaran Penggantian Transpot untuk Tahun berikutnya

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
								beberapa bulan terakhir	
			- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	108 Laporan	108 Laporan	100		
				Jumlah dana	12.643.800	1.350.000	10,68	Belanja pada Rekening Penggantian Transport FKPM Kelurahan tidak dilaksanakan secara menyeluruh, karena tidak terjadi tindakan kriminalitas di beberapa bulan terakhir	Pengurangan Pagu Anggaran Penggantian Transport untuk Tahun berikutnya
			5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	90	90	100		
				Jumlah dana	90.223.500	4.106.025	4,55		

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	5 Kegiatan	4 Kegiatan	80	Kegiatan Forkompimcam pada triwulan terakhir tidak dilaksanakan, adanya pergeseran anggaran, Kegiatan HJK tidak dilaksanakan karena adanya bencana sehingga kegiatan HJK ditiadakan	
				Jumlah dana	90.223.500	4.106.025	4,55		
			- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 kegiatan kunjungan ke mushalla di lokasi kelurahan masing sebanyak 8 kelurahan, 1 kegiatan MTQ	0	0	Ketidak tersediaan anggaran karena refocusing	
				Jumlah dana	0	0	0		
			- Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Tugas	5 Dokumen	3 Dokumen	60	Kegiatan	

No.	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Forkompimcam pada triwulan terakhir tidak dilaksanakan, adanya pergeseran anggaran, Kegiatan HJK tidak dilaksanakan karena adanya bencana sehingga kegiatan HJK ditiadakan	
				Jumlah dana	5 Kegiatan	4 Kegiatan	80		
	-	Jumlah			17.201.533.588	15.623.459.865	90,83		

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Padang Panjang Barat pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun 1 (satu) dari Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2025 - 2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat tahun 2025 dapat disimpulkan dari analisis 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur yaitu :

1. Indikator dari Sasaran I (satu) yaitu “Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Barat” dengan realisasi sebesar 70,05 % dari target 69,25% dengan capaian 101,15%. Realisasi pada indikator ini cukup tinggi hamper mencapai target didukung dengan penilaian Akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat di tiap indicator penilaian mendekati batas nilai yang ditetapkan dalam sistim akuntabilitas kinerja.
2. Tabel indikator dari sasaran II (dua) yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target 97,76 dengan realisasi 93,15 atau persentase capaian 95,28%. Nilai SKM untuk Kecamatan Padang Panjang Barat walaupun tidak sesuai dengan target tetapi masih dinilai dengan prediket sangat baik (A), hal ini bisa dicapai dengan nilai yang tinggi karena dari 9 unsur pelayanan yang dinilai, rata rata semua unsur sudah mendekati untuk memenuhi syarat untuk pelayanan masyarakat
3. Tabel Indikator dari Sasaran III (tiga) yaitu “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan” dengan realisasi sebesar 40,01 % dari target 39,99 % dengan capaian 100,05 %. Tinggi nya realisasi pencapaian pada sasaran ketiga ini didukung dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik itu dalam kegiatan gotoong royong masyarakat, kegiatan pelatihan, maupun kegiatan keagamaan.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah.
- c. Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

- a. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Barat;
- b. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran;

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan alur pengaduan langsung terhadap masyarakat;
- b. Membuat Standar Pelayanan setiap jenis layanan;
- c. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat;
- d. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Padang Panjang Barat ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja ternyata masih banyak kendala, maka diperlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik serta sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.

Padang Panjang, 19 Februari 2026

CAMAT PADANG PANJANG BARAT



ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					KET
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	Persentase	masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	(Jumlah anggaran partisipasi / Total Belanja Langsung kecamatan dan kelurahan) x 100%	(jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan di kecamatan/kelurahan / jumlah masyarakat yang ada di kecamatan/kelurahan) x 100%	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kecamatan Padang Panjang Barat	
2.	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	Angka	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang layanan yang dapat diberikan di Kelurahan dan Kecamatan	(kuisisioner, aplikasi)	(jumlah layanan yang diberikan/jumlah total layanan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan) x 100%	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kecamatan Padang Panjang Barat	
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip Kecamatan Padang Panjang Barat	Angka	masih belum optimalnya perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Skor hasil evaluasi atas penerapan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah yang menggambarkan tingkat efektifitas, efesien si, dan akuntabilitas	Skor Evaluasi dari Inspektorat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kecamatan Padang Panjang Barat	

WALI KOTA PADANG PANJANG
CAMAT PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG



ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19711126 199903 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Jalan Rasuna Said No. 4 Kampung Manggis kode pos 27111
Email:kec.padangpanjangbarat@padangpanjang.go.id-website : padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROMI AR RAHMAN, ST
Jabatan : CAMAT PADANG PANJANG BARAT
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA
Jabatan : PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami .

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Padang Panjang, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG



SONNY BUDAYA PUTRA

Pihak Pertama

CAMAT PADANG PANJANG BARAT



ROMI AR RAHMAN, ST
NIP.19821012 201101 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	39,50%
2	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	97,90%

	Program	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.383.814.088
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.479.596.129
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.474.764.815
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.477.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54.388.650


PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG
SONNY BUDATA PUTRA

Padang Panjang, 02 Januari 2025
CAMAT PADANG PANJANG BARAT

ROMI AR RAHMAN, ST
 NIP. 19821012 201101 1 008



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Jalan Rasuna Said No. 4 Kampung Manggis kode pos 27111
Email:kec.padangpanjangbarat@padangpanjang.go.id-website : padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROMI AR RAHMAN, ST
Jabatan : CAMAT PADANG PANJANG BARAT
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : HENDRI ARNIS
Jabatan : WALI KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami .

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Padang Panjang, 2025

Pihak Kedua
WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

Pihak Pertama
CAMAT PADANG PANJANG BARAT

ROMI AR RAHMAN, ST
NIP.19821012 201101 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG**


SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	39,50%	1	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	39,99%
2	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	97,90	2	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	97,86
				3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Barat	69,25

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.383.814.088	11.183.329.000	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.479.596.129	1.432.692.023	
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.474.764.815	4.482.202.936	
4	Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	30.477.000	12.643.800	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54.388.650	90.223.500	
	TOTAL	19.423.040.682	17.201.091.259	


WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

Padang Panjang, 2025
CAMAT PADANG PANJANG BARAT


ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008

REALISASI RENAKSI TRIWULAN I TAHUN 2025 KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

SASARAN STRATEGIS	INFORMASI INISIASI	SATUAN	INDIKATOR TINGKUNGAN I			INDUKSI TINGKUNGAN II			PROGRAM KEHATAM BUB PEREMTAM	INDOKATOR DITUMBUH OUTPUT	ANGGARAN TRIMULAN I				REKORD PEMERIKSAAN JAWAB	CATATAN URAIAN	REKOMBIBAS	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	LENGKAP IMPAKTIF ANDALIS PERSEKUTUAN TARGET BUB	TARGET	REALISASI			CAPAIAN	PAJDI	REALISASI	CAPAIAN				REKORD PEMERIKSAAN JAWAB
# Mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan	1. Perencanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan	Peran	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5,50	8,14%	1,63%	0	0	0	0	0,00%	1,63%	0	0	0	0	0	0	0
# Mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan	Peran	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	3	100	0	0	0	0	0,00%	100	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	100	0	0	0	0	0,00%	100	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	100	0	0	0	0	0,00%	100	0	0	0	0	0	0	0
			133	133	100	0	0	133	133	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	100	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
			10	10	100	0	0	10	10	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	100	0	0	0	0	0,00%	100	0	0	0	0	0	0	0
# Mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan	Peran	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			170	170	100	0	0	170	170	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	100	0	0	0	0	0,00%	100	0	0	0	0	0	0	0
			25	25	100	0	0	25	25	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			10	10	100	0	0	10	10	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			25	25	100	0	0	25	25	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	3	100	0	0	3	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	100	0	0	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	100	0	0	0	0	0,00%	100	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	100	0	0	0	0	0,00%	100	0	0	0	0	0	0	0

SALURAN VITALITAS	INDUKTOR KINERJA	SATUAN	KINERJA THINILAKI			PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA THINILAKI			INDUKTOR OUTPUT			CAPAIAN INDIKATOR THINILAKI			REKORDEAS		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	INDUKTOR OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN	
			100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			20	20	100	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Prinsip Pengaplikasian April 2025
 KECAMATAN PADANG PANGKALAN BARU
 PADANG PANGKALAN BARU
 KEP. PADANG PANGKALAN BARU
 KEP. PADANG PANGKALAN BARU

NO	UNIT	PELAKU OPERASIONAL	DAFTAR NAMA	STATUS
1	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN
2	HOSPITAL	HOSPITAL	HOSPITAL	HOSPITAL
3	HOSPITAL	HOSPITAL	HOSPITAL	HOSPITAL
4	HOSPITAL	HOSPITAL	HOSPITAL	HOSPITAL
5	HOSPITAL	HOSPITAL	HOSPITAL	HOSPITAL

NOTULEN RAPAT
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

1. Pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Aksi Sasaran Tahun 2025 Kecamatan Padang Panjang Barat melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu
 - a. Presentase Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan dan Kelurahan
Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah sebagai berikut :
 - Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrenbang baik itu di kelurahan maupun di kecamatan
 - Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Gotong Royong yang dilakukan di berbagai lokasi di Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang BaratSedangkan faktor penghambatnya adalah sebagai berikut :
 - Adanya beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan, dikarenakan adanya refocusing anggaran yang memangkas beberapa rekening belanja sehingga pelaksanaan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dan menunggu pada perubahan anggaran.
 - b. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Faktor keberhasilan adalah sebagai berikut :
 - Petugas pelayanan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatFaktor penghambat adalah sebagai berikut :
 - Keadaan sarana dan prasarana yang belum memadai untuk pelayanan

Mengetahui :
Camat Padang Panjang Barat



ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008



Padang Panjang, April 2025

Kasubbag Keuangan, Perenc. dan Evlap


YERVINNA RAHMI FITRI, S.Sos
NIP. 19820718 201001 2 004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Jl. Resuna Said No. 44 Padang Panjang Kode Pos . 27111

Email: padangpanjangbarat@yahoo.co.id Website: www.padangpanjangkota.go.id

DAFTAR HADIR

ACARA : Rapat Evaluasi Kinerja TU 3 dan Evaluasi Kinerja per ASN
HARI / TANGGAL : Senin / 14 April 2021
PUKUL : 08.00 - 12.00 WIB.
TEMPAT : Aula Kecamatan Padang Panjang Barat

NO.	NAMA	UNSUR / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Koari Akhmad	Ornat	1
2	Mufarri	SKCA	2
3	Helmi Yudianto	umpij	3
4	Arisa-d	k. sosial	4
5	Desmiwati	k. Pelayanan	5
6	Ropi Andri	lin. Tnpem	6
7	Haris Nur	kecamatan km	7
8	PANCA WATI	Stafier fil. AT	8
9	Nurmiati amin	lit tek filba	9
10	Lani Nur	Pelt kerah per Ulang	10
11	Devi ya	kas. pmu kec	11
12	TERRYON	lurah Bantal	12
13	Dodi A	lurah paws	13
14	DAMI	Lurah Bujur	14
15	ZULRIKO	Lurah T.H	15
16	Aubar Syahnan	Lurah kemang	16
17	Yura K	KPE	17
18	SARDI	Lurah Silih	18
19	SYAHRIAN	Sekeloa busus	19
20	Yohanes B	Lurah Sibba	20
21	Reza H	Lurah Bujur	21
22	Yuliasubi	Sekel. Pasar Baru	22
23	Fard H	Op. KRS	23
24	Yeni Kurnia Sari	Opr. kec. PB	24
25	Utami D	opr	25
26	Engla ochu Luri	Opr kec PB	26
27	Ldy Gusvianur	Atan kec. PB	27

Padang Panjang, 14 April 2021
HELMI YUANDRA, S.KM
NIP. 19770529 200501 1 004

DOKUMENTASI RAPAT 14 APRIL 2025



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA TRIWULAN II			PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TRIWULAN II					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN II			ANGGARAN TRIWULAN II			BIDANG PENANGGUNG JAWAB	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Langkah-langkah/ aktivitas pencapaian target IKU			TARGET	REALISASI			CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU				REALISASI	CAPAIAN	
			1	1	100	0	0	0	1	1	100		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum		1	1	100%	54.388.650	-	0,00			
			100	100	100	0	0	100	100	100		Sub Kegiatan Pembinaan Keukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		100	100	100%	0	-	#DIV/0!	Seksi Sosial			
			50	50	100	0	0	50	50	100		Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		50	50	100%	1.600.000	-	0,00	Tata Pemerintahan dan Keterlibatan Umum			

Padang Panjang, 30 Juni 2025
Kepala OPD

ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH TIM VERIFIKATOR OPD		
NO/UNIT	NAMA	PARAF
1	SEKRETARIS KECAMATAN	NOFAWATI, SE
2	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	NOFRI ANDRI, S.Ag
3	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DENI YULIADI, S.Pd
4	KEPALA SEKSI SOSIAL	AROSA APRIYANI, SIP, MM
5	KEPALA SEKSI PELAYANAN	DESMIWATI, SE

NOTULEN RAPAT
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

1. Pelaksanaan Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Anggaran sesuai dengan Rencana Aksi Tahunan Tahun 2025 yang telah ditetapkan untuk Triwulan II Tahun 2025 dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II
1.	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	0%	23,35 %
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	0%	45.00 %

2. Pada Triwulan II tahun berjalan, Kecamatan Padang Panjang Barat melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Dari hasil monitoring, terlihat adanya kemajuan capaian meskipun secara umum belum mencapai target tahunan secara menyeluruh. Evaluasi ini mencermati dua indikator utama, yakni partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

- a. Indikator : Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan

Target Kinerja untuk Triwulan II Tahun 2025 adalah 0% sedangkan untuk realisasi s.d. Triwulan II mencapai 23,35%

Meskipun target kuantitatif pada triwulan ini belum ditetapkan secara eksplisit (0%), capaian realisasi sebesar 23,35% menunjukkan adanya pergerakan positif dalam mendorong pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

Faktor keberhasilan dari capaian ini antara lain :

- Terselenggaranya beberapa forum partisipatif seperti Musrenbang dan pertemuan RT dan Kelurahan serta Kecamatan
- Kegiatan pemberdayaan yang mulai dilaksanakan melalui kelurahan.
- Adanya sosialisasi awal terkait rencana kerja kecamatan kepada masyarakat.

Namun demikian, faktor penghambat yang masih dirasakan meliputi :

- Rendahnya minat dan kehadiran masyarakat dalam forum perencanaan.
- Kurangnya saluran komunikasi yang menjangkau seluruh elemen masyarakat.
- Ketergantungan sebagian masyarakat pada program bantuan, bukan inisiatif pembangunan.

- b. Indikator : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Target kinerja untuk Triwulan II Tahun adalah 0% sedangkan untuk realisasi s.d. Triwulan II adalah sebesar 45,00%

Nilai survei kepuasan masyarakat yang telah mencapai 45,00% meskipun tanpa target spesifik pada triwulan ini, mengindikasikan adanya persepsi awal masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Faktor keberhasilan capaian ini mencakup:

- Respons cepat terhadap kebutuhan layanan administratif oleh petugas kecamatan.
- Peningkatan kualitas layanan di loket pelayanan publik.
- Mulainya penerapan pelayanan berbasis digital secara terbatas.

Namun, terdapat faktor penghambat yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat, antara lain:

- Belum meratanya kualitas layanan antar bidang/subbagian.
- Masih ditemukannya keterlambatan dalam pelayanan akibat keterbatasan SDM.
- Gangguan teknis dalam sistem digital pelayanan yang belum sepenuhnya stabil.

Capaian indikator pada Triwulan II menunjukkan adanya kemajuan positif meskipun belum optimal. Perlu upaya konsisten dalam mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif serta peningkatan kualitas layanan secara merata, terutama melalui penguatan SDM dan sarana pendukung pelayanan. Hasil ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi percepatan capaian target pada triwulan berikutnya.

Padang Panjang, 08 Juli 2025

Mengetahui :
Camat Padang Panjang Barat

Notulis Rapat

ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008

YERVINNA RAHMI FITRI, S.Sos, MM
NIP. 19820718 201001 2 004





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Jl. Rasuna Said No. 44 Padang Panjang Kode Pos. 27111

Telp. (0752) 83104. 84509

Email. padangpanjangbarat@yahoo.co.id-Website www.padangpanjangkota.go.id

DAFTAR HADIR

ACARA : Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025
HARI/TANGGAL : Selasa / 08 Juli 2025
TEMPAT : Hall Kantor Camat Padang Panjang Barat
PUKUL : 10.00 s/d 12.00 wib

NO.	NAMA	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN
1	Arza . A	K. Sosial	1
2	Dewi Yuliad	Kan. PAUK	2
3	Roni Dkk	Comit	3
4	YOHANES ALKALIMAH	Lurah SULBA	4
5	DONAL. H	Lurah Pasbar	5
6	TEDRYON .	Lurah Rakiz	6
7	Dodi Apnandi	Lurah Pas	7
8	SARALI	Lurah SMT	8
9	DANI	Lurah Bujur	9
10	Arbar . s	Lurah Lemang	10
11	ULLATRICO	Lurah T. II	11
12	Nopi Andri	Kan. Tapan	12
13	NOFAWATI	SEKCAM	13
14	Desmizati	Kasi Pelayanan	14
15	Yerunna RF	Kesbang KPER	15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

Padang Panjang, 08 Juli 2025

Mengetahui :
Sekretaris Kecamatan

NOFAWATI, SE

NIP. 19681111 200212 2 004

NOTULEN RAPAT
EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

1. Pelaksanaan Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Anggaran sesuai dengan Rencana Aksi Tahunan Tahun 2025 yang telah ditetapkan untuk Triwulan III Tahun 2025 dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Realisasi s/d Triwulan III
1.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	0%	28,13 %
2.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	0%	75,00 %

2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja hingga Triwulan III Tahun 2025, Kecamatan Padang Panjang Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang mencerminkan komitmen dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta kualitas pelayanan kepada publik. Dua indikator utama yang menjadi fokus dalam periode ini adalah Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

1. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan

Realisasi: 28,13%

Target Triwulan III: 0% (target tahunan belum terbagi per triwulan)

Capaian partisipasi masyarakat sebesar 28,13% hingga Triwulan III menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun tidak terdapat target triwulanan yang spesifik, hasil ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Partisipasi tersebut terlihat dari meningkatnya kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), kegiatan gotong royong, serta partisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Hal ini menjadi indikasi bahwa program fasilitasi partisipasi yang dilakukan kecamatan mulai berjalan efektif dan mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Faktor Pendorong :

- Adanya komunikasi dan koordinasi yang intensif antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan tokoh masyarakat.
- Program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan ekonomi kreatif dan kegiatan sosial berhasil menarik minat warga.
- Dukungan dari lembaga kemasyarakatan dan RT/RW yang aktif dalam memobilisasi warganya.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran mereka dalam pembangunan.

Faktor Penghambat :

- Masih terdapat persepsi bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah semata, bukan kolaboratif.
- Keterbatasan waktu dan kesibukan masyarakat mengurangi partisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan.
- Kurangnya sosialisasi terhadap beberapa program baru yang menyebabkan sebagian warga belum memahami manfaat kegiatan tersebut.
- Faktor sosial ekonomi, di mana sebagian masyarakat lebih fokus pada pekerjaan harian sehingga sulit terlibat aktif dalam kegiatan kolektif.

2. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Realisasi: 75,00%

Target Triwulan III: 0% (target didapat sesuai hasil penelitian lembaga)

Capaian nilai SKM sebesar 75,00% menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Padang Panjang Barat berada pada kategori "Baik". Meskipun belum mencapai nilai optimal seperti pada

tahun sebelumnya, hasil ini tetap menunjukkan adanya perbaikan dan upaya peningkatan kualitas layanan di berbagai bidang, seperti administrasi kependudukan, surat rekomendasi, serta pelayanan umum lainnya.

Faktor Pendorong :

- Komitmen aparaturnya kecamatan dalam memberikan pelayanan cepat dan ramah kepada masyarakat.
- Penerapan mekanisme pelayanan satu pintu (one stop service) yang mempermudah proses administrasi.
- Pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi pelayanan berbasis digital (Coratex dan SimGaji) yang mempercepat alur layanan.
- Adanya pengawasan internal dan evaluasi berkala terhadap kualitas layanan publik.

Faktor Penghambat :

- Perbedaan data dan sistem administrasi antara aplikasi Coratex dan SimGaji Pemda menyebabkan ketidaksesuaian hasil perhitungan pajak dan keterlambatan pelaporan.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang pelayanan masih menjadi kendala, terutama pada saat volume layanan meningkat.
- Gangguan teknis seperti koneksi jaringan dan keterbatasan sarana komputerisasi masih ditemukan di beberapa titik layanan.
- Kepuasan masyarakat menurun pada aspek waktu tunggu dan konsistensi pelayanan di jam sibuk.

3. Secara umum, kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat hingga Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan arah yang positif.

- Tingkat partisipasi masyarakat mengalami peningkatan yang menggambarkan tumbuhnya kesadaran dan kemauan warga untuk terlibat aktif dalam pembangunan.
- Sementara itu, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sudah tergolong baik, meskipun masih perlu peningkatan dalam aspek kecepatan, ketepatan, dan konsistensi layanan.

Untuk menjaga tren positif tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Memperluas program sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat agar partisipasi lebih merata.
2. Meningkatkan kapasitas aparaturnya kecamatan dalam hal pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi.
3. Melakukan penyesuaian sistem administrasi dan data digital antar aplikasi agar lebih akurat dan efisien.
4. Mengoptimalkan pengawasan dan evaluasi pelayanan secara berkala agar umpan balik masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

Padang Panjang, 13 Oktober 2025

Mengetahui :
Camat Padang Panjang Barat



ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008

Netulis Rapat



YERVINNA RAHMI FITRI, S.Sos, MM
NIP. 19820718 201001 2 004



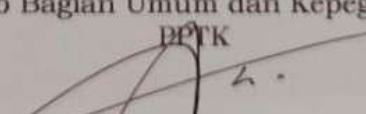
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
Jalan Rasuna Said No.44 Padang Panjang Kode Pos 27111
[Email: padangpanjangbarat@yahoo.co.id](mailto:Email.padangpanjangbarat@yahoo.co.id)
[Website: www.padangpanjangkota.go.id](http://Website:www.padangpanjangkota.go.id)

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Evaluasi Kinerja TW III
Hari / Tanggal : Senin/ 13 Oktober 2025
Pukul : 08.30 s/d 12.30 WIB
Tempat : Aula Kantor Camat Padang Panjang Barat

No	Nama	Unsur/Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Romi	Camat	1.	
2.	Salsi	Lurah Siat		2.
3.	Yokana 19	Lurah SILBA	3.	
4.	DAMI	Lurah Bujur		4.
5.	DONAL-H	Lurah Pasbar	5.	
6.	Khasyi M.	Kasi branch silat		6.
7.	rofi Anis	Ko. Tapan PPD	7.	
8.	AFRIZAL	Ko. Tapan THT		8.
9.	Daniel M.S	PT. SIKR. KIL BB	9.	
10.	Murtadhi C	PH M		10.
11.	Syafrizal	Ko. Tapan Perung	11.	
12.	SEPTIA NARMAN	Ko. Tapan Kemas		12.
13.	Rani Nourizal	Ko. Tapan Batur	13.	
14.	Dodi Apnandi	Lurah paus		14.
15.	TEDRYOAN	Lurah Balai ²	15.	
16.	Yuviana RF	Ko. Tapan KPEP		16.
17.	Nofawati	Ko. Tapan	17.	
18.	Helmi Sembur	Unreperg		18.
19.			19.	
20.				20.

Padang Panjang, 13 Oktober 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
DPK


HELMI YUANDRA, SKM
NIP.197705292005011004

DOKUMENTASI RAPAT 13 OKTOBER 2025





SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA TRIWULAN IV			PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TRIWULAN IV					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN IV			ANGGARAN TRIWULAN IV		BIDANG PENANGGUNG JAWAB	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Langkah-langkah/ aktivitas pencapaian target KU							TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI				CAPAIAN	
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT	TARGET			REALISASI	CAPAIAN								
			1	1	100	0	0	1	1	100		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	1	1	100%	90.223.500	-	0.00			
			100	100	100	0	0	100	100	100		Sub Kegiatan Pembinaan Kesukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kesukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	100	100%	-	-	0.00	Seksi Sosial		
			75	75	100	0	0	75	75	100		Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	75	75	100%	90.223.500	-	0.00	Tata Pemerintahan dan Keleriban Umum		

Padang Panjang, 15 Oktober 2025
Kepala OPD

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH TIM VERIFIKATOR OPD		
NO/UNIT	NAMA	PARAF
1 SEKRETARIS KECAMATAN	NOFAWATI, SE	
2 KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	NOFRI ANDRI, S.Ag	
3 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DENI YULIADI, S.Pd	
4 KEPALA SEKSI SOSIAL	AROSA APRIYANI, SIP, MM	
5 KEPALA SEKSI PELAYANAN	DESMIWATI, SE	

ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012.201101.1.008

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INTERNAL
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
1	A. Perencanaan Kinerja								
	1 Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achivable, Relevant and Time-Bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya	1 Melakukan koordinasi tentang indikator kinerja	1 laporan	B07	Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Proses	Telah dilakukan penyempurnaan indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achivable, Relevant and Time-Bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya	Minimnya SDM dalam pemahaman SMART	
	2 Menyelaraskan sasaran pada indikator Kinerja Utama dengan Renstra	1 Melakukan koreksi sasaran agar sesuai antara IKU dan Renstra	1 laporan	B07	Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Proses	Telah dilakukan koreksi sasaran agar sesuai antara IKU dan Renstra		
	3 Melakukan perbaikan penjejangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan Critical Succes Factor (CFS) dan Logical Framewok dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi	1 Melakukan perbaikan penjejangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan Critical Succes Factor (CFS) dan Logical Framewok dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi	1 laporan	B07	Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Proses	Koordinasi dengan pejabat struktural	Minimnya SDM dalam pemahaman CSF	

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
	4 Menyelaraskan indikator Kinerja pada perjanjian Kinerja dengan Cascading	1 Menyelaraskan indikator Kinerja pada perjanjian Kinerja dengan Cascading	1 laporan	B07	Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Proses	Telah dilakukan penyelarasan indikator Kinerja pada perjanjian Kinerja dengan Cascading		
	B. Pengukuran Kinerja								
	1 Membuat Mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (SOP Pengumpulan Data Kinerja)	1 Melakukan monitoring dan evaluasi	1 laporan	B07	Seksi Pelayanan	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk penyusunan data kinerja sesuai dengan SOP	Koordinasi dengan Kasi Pelayanan		
	2 Pimpinan Organisasi selaku pengambil keputusan (Decision Maker) ikut terlibat dalam memonitoring capaian kinerja secara berkala	1 Melakukan monitoring dan evaluasi	4 Laporan	B03, B07, B10, B12	Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja OPD oleh pimpinan dan didsampaikan laporan evaluasi pencapaian kinerja per triwulan	Telah dilakukan monitoring dalam pencapaian kinerja oleh pimpinan OPD		
	3 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	1 Melakukan monitoring dan evaluasi	4 Laporan	B03, B07, B10, B12	Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja OPD oleh pimpinan dan didsampaikan laporan evaluasi pencapaian kinerja per triwulan	Telah dilakukan monitoring secara triwulan dari level staf sampai eselon IV		

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
	4 Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai		1 Dokumen	B12	Sekretaris Kecamatan	Proses			
	C. Pelaporan Kinerja								
	1 Selalu mempedomani Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja	Rapat Evaluasi	1 Dokumen	B03	Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Melakukan rapat evaluasi capaian kinerja setiap 3 bulan sekali dan disampaikan Notulen Rapat Evaluasi Kinerja dalam Laporan Pengukuran Kinerja setiap triwulan	Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja telah disampaikan ke Bagian Organisasi per triwulan sesuai dengan format		
	D. Evaluasi Internal								
	1 Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang	Rapat Evaluasi Program Kegiatan	1 Dokumen	B10,B12	Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Melakukan rapat evaluasi capaian kinerja setiap 3 bulan sekali dan disampaikan Notulen Rapat Evaluasi Kinerja dalam Laporan Pengukuran Kinerja setiap triwulan	Identifikasi kinerja per Program	Kurang kerjasama dalam pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan melalui target kinerja per Perjanjian Kinerja	

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
----	-------------	-------------------------------	--------	----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------

Padang Panjang, 31 Desember 2025
CAMAT PADANG PANJANG BARAT



ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008